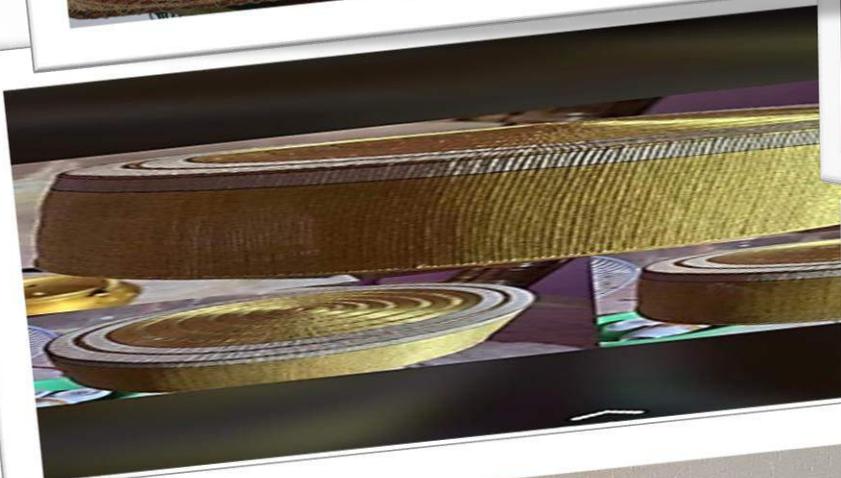




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021



Dinas Perindustrian Kabupaten Bone
Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 11 Kodepos 92733
Website : disperin.bone.go.id email : dperindustrian11@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018 – 2023. LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan,

sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 12 Januari 2022

Dinas Perindustrian Kab. Bone,



Dr. H. KHALIL, MT

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

Nip : 19651112 199203 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Umum	5
B. Organisasi	8
C. Isu Strategis	13
D. Aspek Strategis Organisasi	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Tujuan dan Sasaran	22
B. Strategi dan Arah Kebijakan	22
C. Indikator Kinerja Utama	25
D. Perjanjian Kinerja	26
E. Standar Penilaian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	37
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan Umum	55
B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	57

SISTEMATIKA PENULISAN

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Kabupaten Bone disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan Gambaran Umum, Organisasi, Isu Strategis, dan Aspek Strategis Organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan secara singkat mengenai Rencana Strategi dan Rencana Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kinerja termasuk keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tinjauan umum dan khusus tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2021 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2018-2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP Dinas Perindustrian Kabupaten Bone ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.
18. Keputusan Bupati Bone Nomor 546 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perindustrian.

B. Organisasi

Pembentukan OPD tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian.

B.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Uraian Tugas

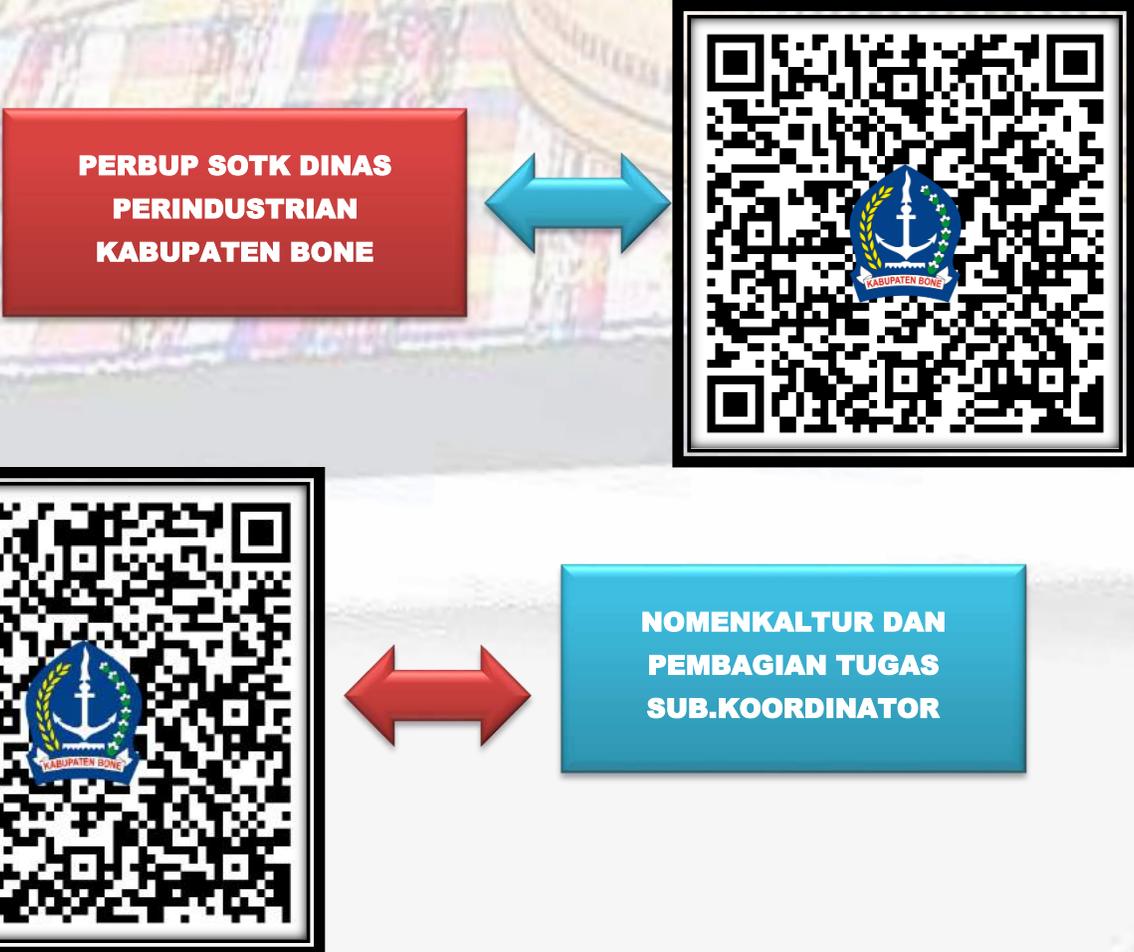
Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dipimpin seorang Kepala Dinas dibantu seorang Sekretaris, Empat orang Kepala Bidang, tiga orang Kepala Sub Bagian dan Dua Belas orang Sub Koordinator dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perindustrian urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.2. STRUKTUR ORGANISASI

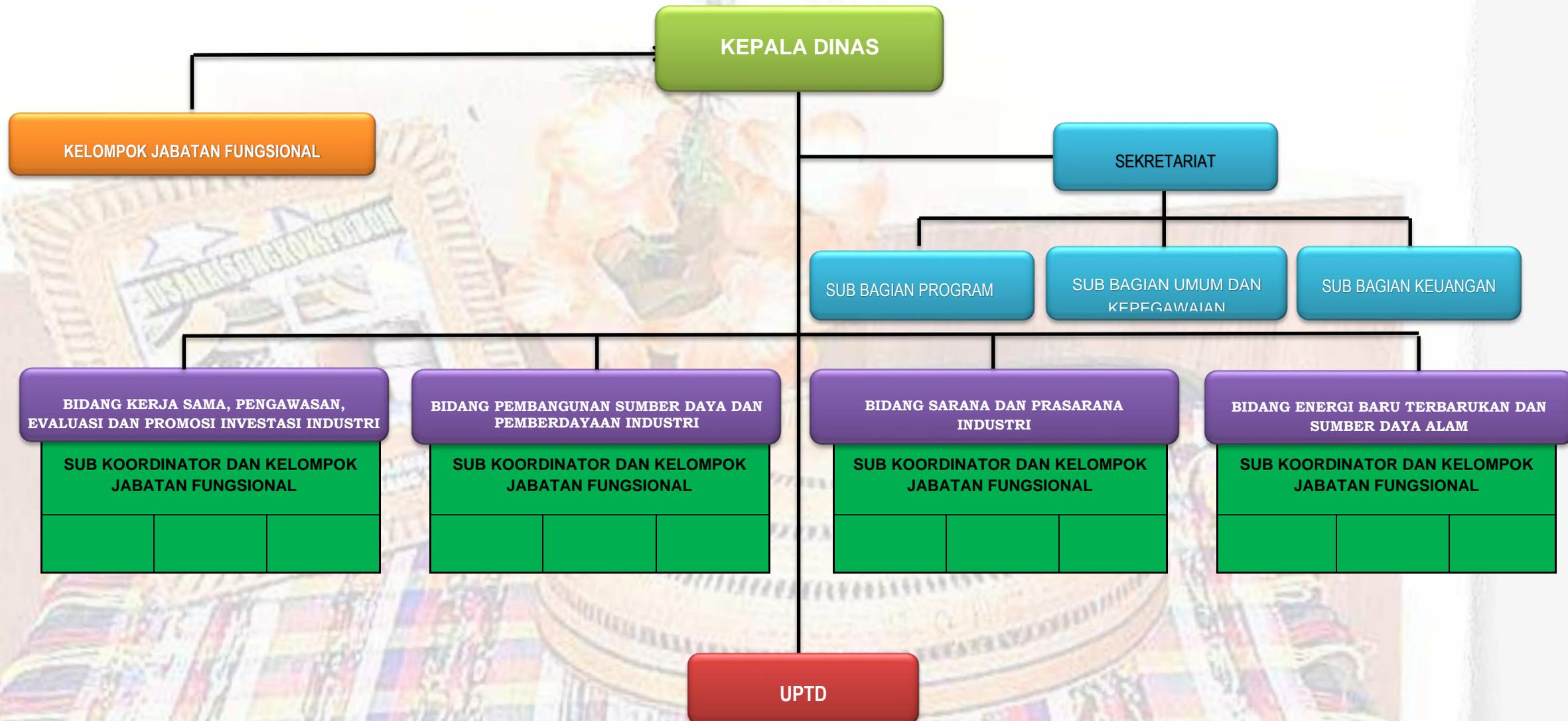
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- 1). Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 2). Bidang Kerja Sama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri
- 3). Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri.
- 4). Bidang Sarana dan Prasarana Industri:
- 5). Bidang Energi Baru Terbarukan dan Sumber Daya Alam :
- 6). Jabatan Fungsional;
 - a. Sub. Koordinator Kerja sama Industri
 - b. Sub.Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Industri
 - c. Sub.Koordinator Promosi Investasi Industri
 - d. Sub.Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
 - e. Sub.Koordinator Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri
 - f. Sub.Koordinator Pemanfaatan Teknologi dan Pembinaan Industri Hijau;
 - g. Sub.Koordinator Standarisasi Industri
 - h. Sub.Koordinator Fasilitasi Industri
 - i. Sub.Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi;
 - j. Sub.Koordinator Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi;
 - k. Sub.Koordinator Pengendalian dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
 - l. Sub.Koordinator Industri Sumber Daya Alam
- 7). UPTD



Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, sesuai Perbup Nomor 92 tahun 2021, adalah sebagai berikut :



B.3 SUMBER DAYA APARATUR

Diagram 1

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Kab. Bone



Diagram 2

Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Perindustrian Kab.Bone

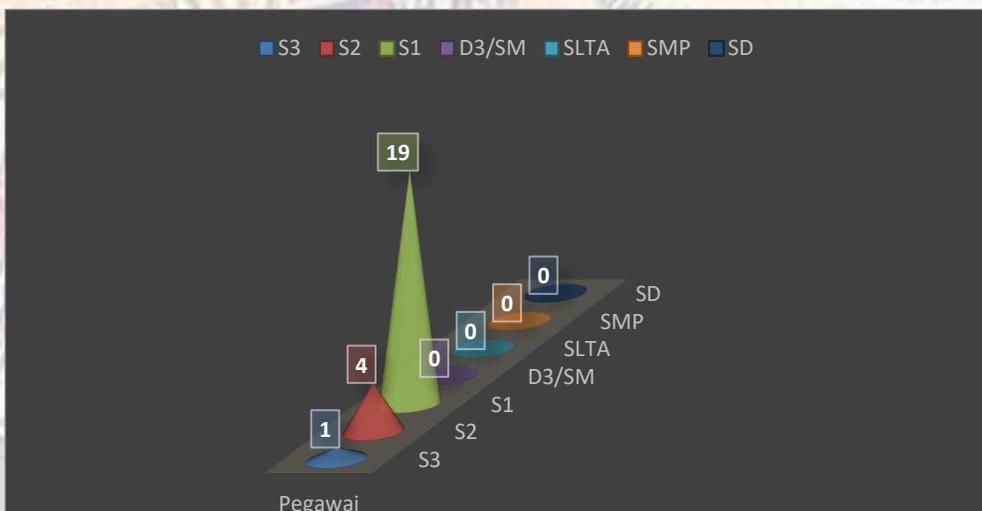


Diagram 3

Kepangkatan Pegawai Dinas Perindustrian Kab. Bone

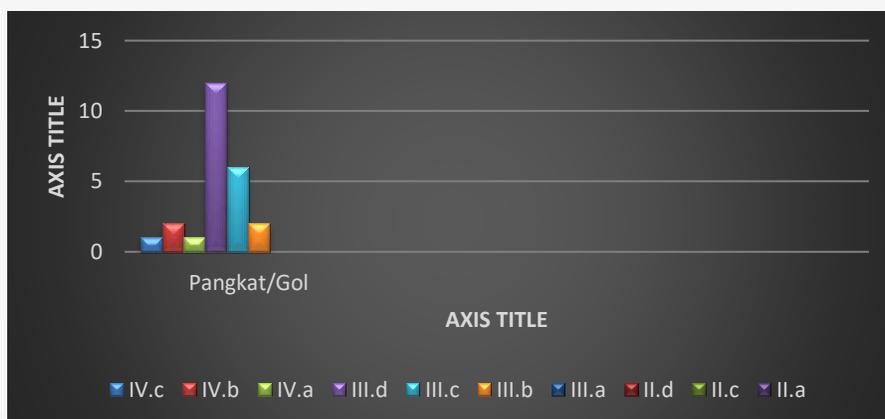
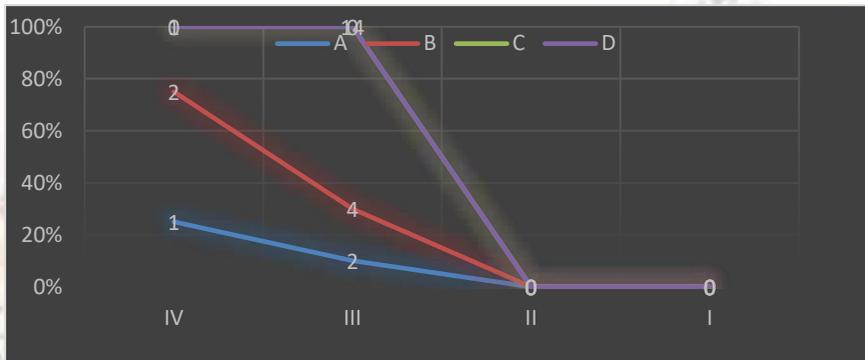


Diagram 4

Golongan/Ruang ASN



Untuk Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional/Sub.Koordinator sendiri pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone terdiri atas 21 jabatan yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural :
 - Eselon II b 1 orang
 - Eselon IIIa sebanyak 0 orang
 - Eselon IIIb sebanyak 5 orang
 - Eselon IV sebanyak 3 orang
- Pejabat Fungsional/Sub.Koordinator :
 - Eselon IV sebanyak 12 orang

Adapun aset yang dikelola Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Tanah & bangunan milik Dinas Perindustrian Kab. Bone

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor	Bidang	2
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2

Sumber Data : Pengurus Barang Dinas Perindustrian Kab.Bone

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri atas meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya, yang diperoleh dari pos anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Bone baik APBN maupun APBD Kabupaten Bone.

Kendaraan dinas yang dimiliki sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) kendaraan roda dua dan sebanyak 3 (Tiga) kendaraan roda empat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Kendaraan dinas milik Dinas PerindustrianKab. Bone

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	3
2.	Kendaraan Roda 2	Unit	27

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.

C. Isu Strategis

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Renstra 2018-2023 dan RENJA tahun 2021 adalah :

1. Terjadinya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada diluar wilayah yang disebutkan di dalam RT RW pertambangan;
2. Masih lambatnya proses penerbitan rekomendasi usaha pertambangan sehingga menghambat penerbitan rekomendasi usaha pertambangan oleh Dinas Perindustrian Kab. Bone;
3. Rendahnya Kesadaran para Pengusaha di Sektor Pertambangan dalam memenuhi kewajibanya;
4. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan penanganan pertambangan tanpa izin;
5. Besarnya nilai konfensasi lahan untuk pengembangan sektor pertambangan;
6. Belum Optimalnya pendataan rumah tangga yang belum menikmati jaringan listrik PLN;
7. Masih Terbatasnya data Potensi pengembangan energi baru terbarukan;
8. Belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis kepada para pelaku usaha disektor Migas;
9. Masih terbatasnya tenaga teknis untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Masih Terbatasnya data Potensi sumber daya mineral, air tanah dan mata air
11. Rendahnya Inovasi dan adopsi Teknologi, Pengembangan Desain/ Kemasan Produk Industri;
12. Rendahnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Industri;
13. Kurangnya Wawasan Pengusaha IKM dalam hal Manajemen, Kewirausahaan, Mempromosikan Produk IKM;
14. Terbatasnya Modal Usaha dan Rendahnya Akses terhadap Sumber-Sumber Permodalan;
15. Masih Rendahnya Penggunaan Teknologi dalam Proses Produksi;
16. Masih Kurangnya Sentra-Sentra Pengembangan Industri.

D. Aspek Strategis Organisasi

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja publik, oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah "Perbaikan Kemasan Industri" (*KK'ta /Klinik Kemasan Kita*).

- Nama Usaha : Sarabba Asli
Jenis Produk : Minuman Sarabba
Alamat Usaha : Desa Lilinaajangale Kec. Ulaweng



Before

After



- Nama Usaha : Sutera Opo
- Jenis Produk : Sarung Sutra
- Alamat : Desa Opo Kec. Ajangale
- Usaha

Desain Kemasan Kotak Sutera Opo



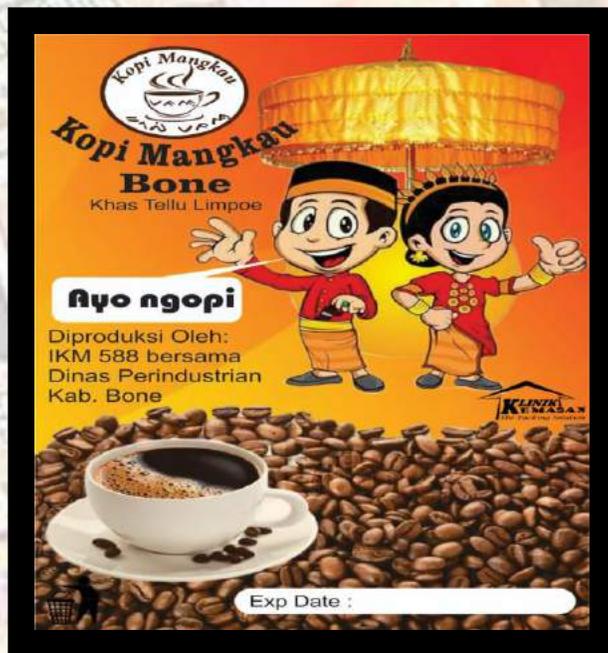
Before

After



- Nama : IKM 588
- Jenis Produk : Kopi Instan
- Alamat : Kec Tellu Limpoe
- Usaha

Sticker Kemasan



Before

After



JUDUL INOVASI / GAGASAN	URAIAN INOVASI / GAGASAN			
	LATAR BELAKANG / PERMASALAHAN	TUJUAN	MANFAAT	GAMBARAN SINGKAT
HALO GIBO (HALO GALERY INDUSTRI BONE)	<ol style="list-style-type: none"> Masih minimnya fasilitas Pemasaran Produk IKM Banyak pelaku usaha IKM yang menghentikan produksinya akibat tidak adanya wadah untuk promosi dan penjualan produk Susahnya membeli produk unggulan Kabupaten Bone bagi para perantau di daerah lain 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Penjualan Produk IKM Memperluas wilayah pemasaran produk IKM 	<ol style="list-style-type: none"> membantu pelaku usaha IKM dalam memasarkan Produk yang di hasilkan memudahkan masyarakat diluar Kabupaten Bone untuk mendapatkan produk unggulan. 	<ol style="list-style-type: none"> HALO GIBO merupakan sebuah aplikasi penjualan produk unggulan Kabupaten Bone yang akan merangkul seluruh produk dari 27 Kecamatan. HALO GIBO juga menyediakan ruang yang akan menampilkan deskripsi serta keunggulan produk yang menjadi produk Unggulan Kabupaten Bone
GO SHOW INDUSTRI	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya pemanfaatan Sumber Daya Industri yang ada di Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Jumlah IKM baru Meningkatkan kualitas produk IKM 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> GO SHOW INDUSTRI merupakan program jemput bola dimana para Pembina IKM dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bone akan

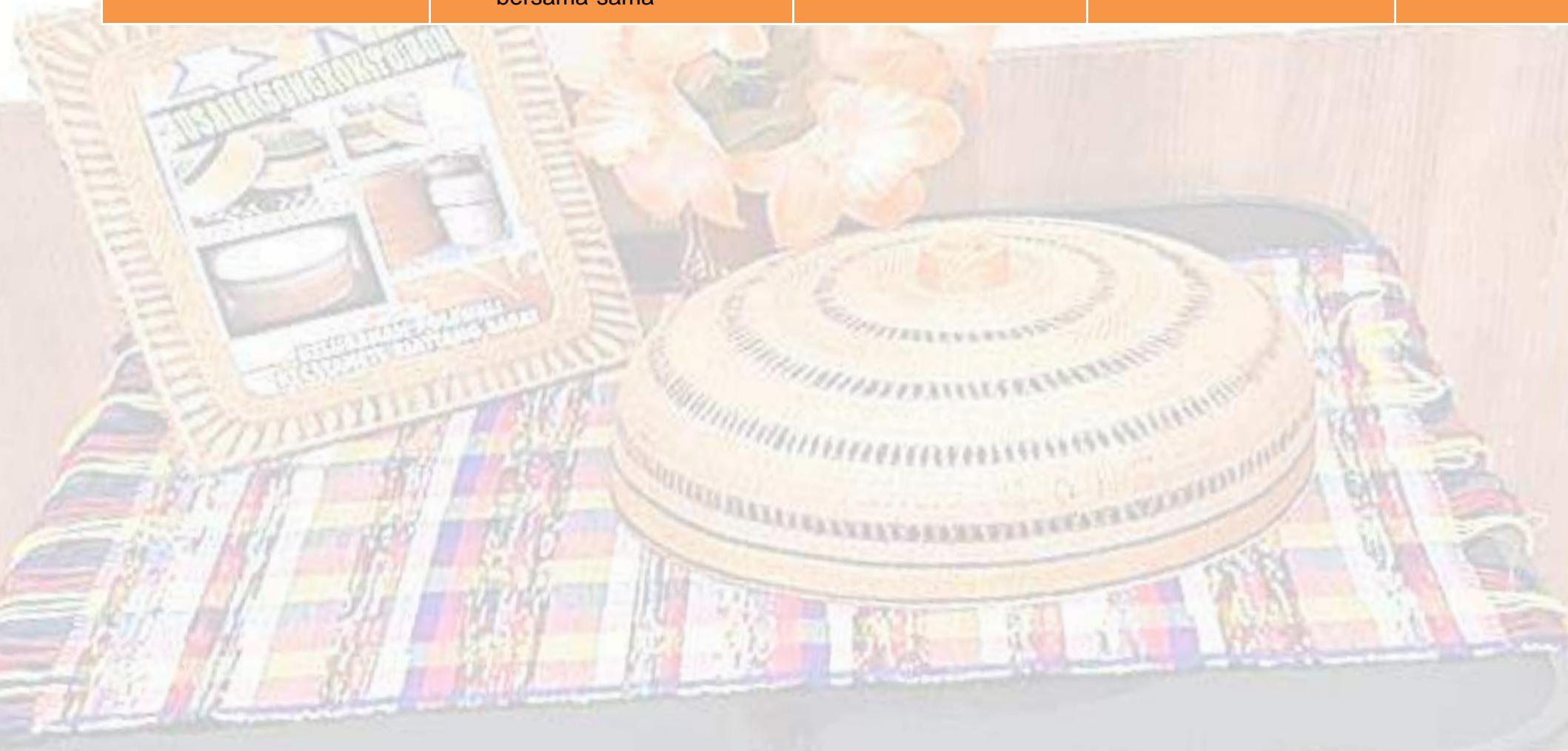
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kualitas Produk yang dihasilkan IKM masih perlu perbaikan yang signifikan untuk dapat bersaing di Pasar Modern 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan Produk Ungulan IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengurangi angka pengangguran 3. Produk IKM siap bersaing di Pasar Modern 	<p>turun langsung di kecamatan untuk mendeteksi sumber daya /potensi industri yang seharusnya dikembangkan , melakukan pendampingan secara insentif hingga produk tersebut dapat di pasarkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. GO SHOW INDUSTRI juga melakukan pendampingan terhadap produk IKM yang sudah ada dengan cara Pembinaan terkait kualitas diversifikasi produk dan Manajemen Pemasaran
<p>RUSUK IKM (RUANG KONSELING DAN KONSULTASI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya ruang tersendiri terkait penyelesaian permasalahan pelaku usaha IKM 2. Banyaknya calon pelaku usaha IKM yang tidak melanjutkan ide dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah IKM baru 2. Meningkatkan Jumlah Produk Unggulan 3. Meningkatkan produk industri yang lebih Inovatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat 2. Munculnya Produk baru yang lebih kreatif dan berdaya saing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUSAK IKM dilaksanakan dengan membuka ruang konsultasi dan konseling terkait kualitas produk ,Permodalan,Manajemen Bisnis, Manajemen Keuangan, Pemasaran serta konsultasi yang berkaitan dengan diversifikasi dan pengembangan Produk.

gagasannya dikarenakan permasalahan yang dihadapi

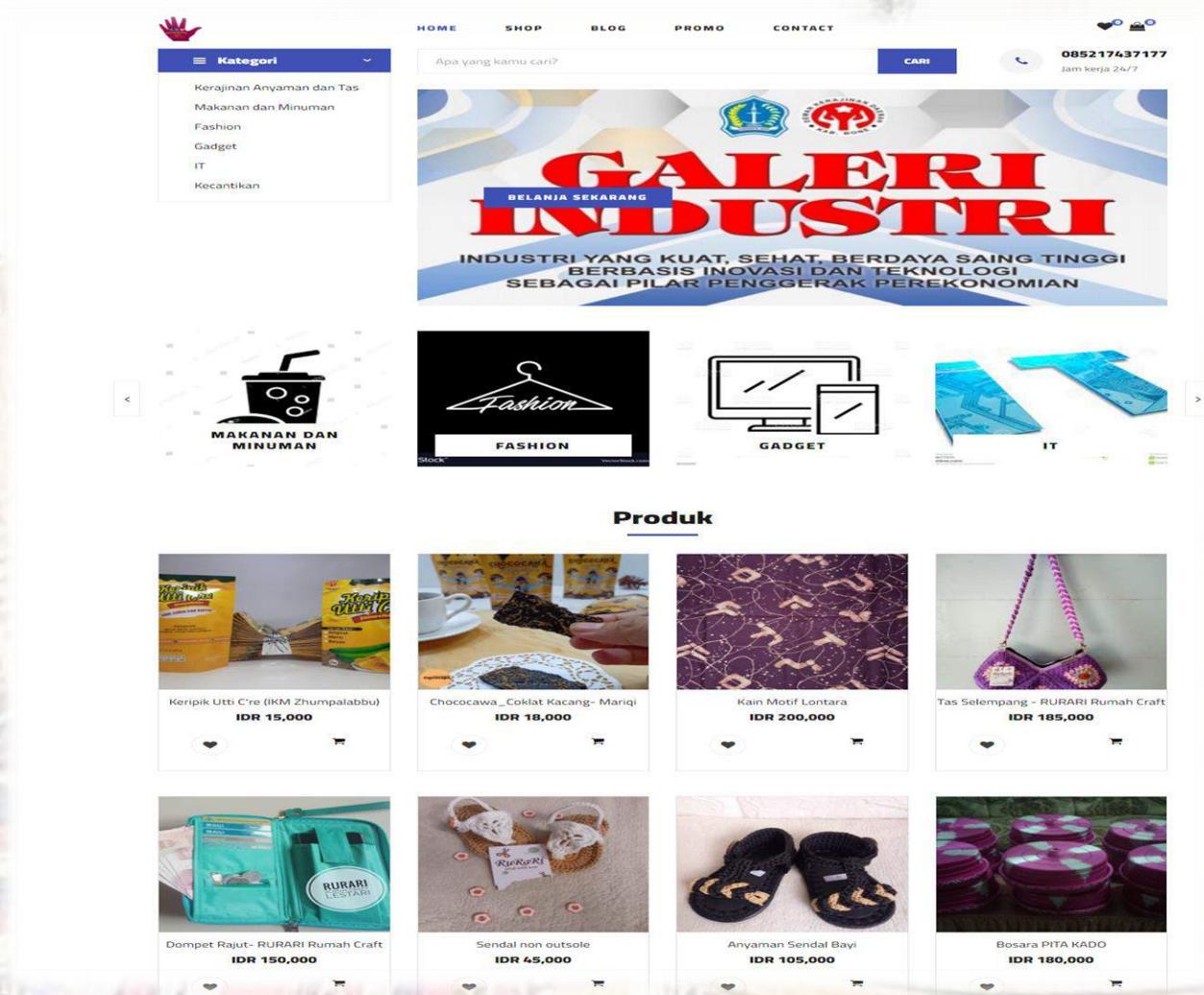
3. Banyaknya permasalahan IKM yang perlu dipecahkan secara bersama-sama

4. Meningkatkan kualitas dan kreatifitas serta Inovasi bagi pelaku Usaha IKM

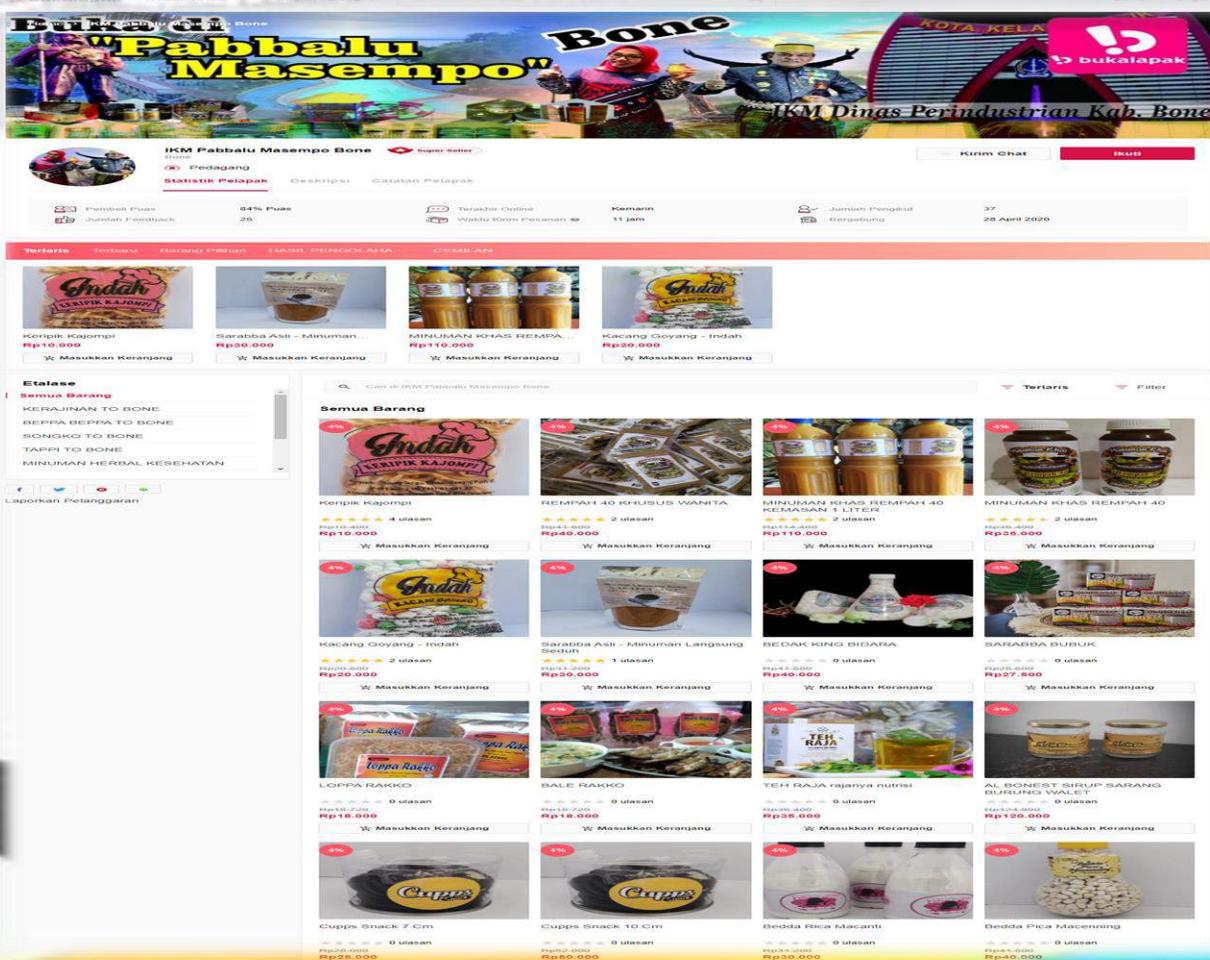
2. RUSAK IKM ini melayani secara langsung maupun secara online Konsultasi melalui media Whatsapp dan Telegram



HALO GALERI INDUSTRI BONE



BUKALAPAK PABBALU MASEMPO BONE



DAFTAR IKM KAB.BONE DIFASILITASI MASUK PASAR MODERN MAKASSAR

No	Nama IKM	Nama Pemilik	Nama Produk
1	GELAEEL		
1	CUPPS SNACK	Zulfah Mandinatul Munaqisyah	Kripik Brownis
2	Juragan Kampoeng	Faisal	Sarabba Bubuk
3	Mariqi Cake and Snack	Kurnia Mariatul Qiftih	Chococawa
4	King Bidara	Jumardi	Bedak Bidara
5	FMB FOOD	FANGGI	Amplag Bandeng
6	Plaza Desa Indonesia	Fadli	TEH RAJA
7	CV.Ahsam Arira Macenning	Samsu Rijal N	Macenning
8	Salsa Abon	Sugira.S.Sos	Abon Ikan
9	MARAJA		Palm Sugar
2	NOVOTEL		
1	Kripik Utti C're	Wisataman	Keripik Pisang
2	Hitam Putih	Sudirman,SE	Rampa 40
3	UYHA CRAFT	SITTI URWAH SALEH	TAS Kain Sutra
4	CUPPS SNACK	Zulfah Mandinatul Munaqisyah	Kripik Brownis
5	Juragan Kampoeng	Faisal	Sarabba Bubuk
6	Mariqi Cake and Snack	Kurnia Mariatul Qiftih	Chococawa
7	King Bidara	Jumardi	Bedak Bidara
8	FMB FOOD	FANGGI	Amplag Bandeng

9	Plaza Desa Indonesia	Fadli	TEH RAJA
10	CV.Ahsam Arira Macenning	Samsu Rijal N	Macenning
11	Salsa Abon	Sugira.S.Sos	Abon Ikan
12	MARAJA		Palm Sugar
13	H. Nawir Group	Hj. Rahmatang	Songkok To Bone
14	Anyaman Pita Kado	Jumrah	Bosara, Tempat Tisu, tatakan Gelas
15	Lampu Arham	Arham	Lampu Hias dari Buah Maja
16	Albonise	Asma	Minuman Sarang Burung Walet
17	Saparah	Kasma	Sarung bantal, Taplak Meja dan Saparah
18	Sarabba Asli		Sarabba Asli
19	Sutera OPO	Nurlia	Sarung Sutera Cora Lebba

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- + Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
 Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM
- + Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat
 Tujuan :
 - Menurunkan Angka Kemiskinan

Tabel II.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	BB	BB	A
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,57	6,68	6,87	6,97	7,04
	Persentase Pertumbuhan IKM	94,76	96,2	98,45	98,55	98,65
	Nilai Produksi IKM	9,699,606,532	9,700,576,298	9,701,546,064	9,702,546,064	9,703,546,064

Sumber Data: Dinas Perindustrian Kab.Bone

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone. Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

1.1. VISI

Berdasarkan Visi Bupati Bone 2018– 2023 yaitu “ **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**. Dapat diuraikan bahwa **Mandiri** berarti Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan, **Berdaya Saing** berarti terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional, sedangkan **Sejahtera** berarti meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. MISI

Dari uraian Visi diatas dijabarkan dalam Misi Bupati yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan social dasar lainnya
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan public
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat
7. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan social dasar lainnya

8. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan social dasar lainnya
9. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan
10. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan public
11. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

Berkaitan dengan misi tersebut urusan Industri dan ESDM sangat erat kaitanya dengan misi ke 1 dan 2 yaitu :

- ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Kkn).***
- ***Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.***

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu **Misi** sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas, profesionalisme, disiplin dan motivasi kerja sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima;
- 2) Meningkatkan peran perindustrian, pertambangan dan energi bagi kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mengembangkan konservasi perindustrian, pertambangan dan energi.
- 4) Mengembangkan sistem informasi dan kualitas data base perindustrian, pertambangan dan energi.
- 5) Mendorong peran serta pengusaha perindustrian, pertambangan dan energi dalam pemberdayaan masyarakat lingkaran usaha industri dan pertambangan.
- 6) Mengembangkan sinergitas dan aksesibilitas antara instansi terkait.
- 7) Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan industri dan pertambangan yang berdaya guna dan berkelanjutan
- 8) Mendorong pengembangan energi alternatif (energi baru terbarukan).
12. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan social dasar lainnya
13. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan
14. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan public
15. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Gambar II.1. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone



Sumber Data: Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

C. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian dari sektor Industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri, Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri, dan Bidang Sarana dan Prasarana Industri serta BPS
		Persentase Pertumbuhan IKM	$\frac{\text{Jumlah IKM yang tahun (N+1) - (N-1)}}{\text{Jumlah Total IKM tahun N-1}} \times 100\%$	
		Nilai Produksi IKM	Jumlah Nilai Produksi IKM	

Sumber Data: Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri, Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri, dan Bidang Sarana dan Prasarana Industri serta BPS.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA 2018-2023, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Dinas Perindustrian Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Kab.Bone Tahun 2021

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	39,410,000
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,574,839,599
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,87	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	751,202,000
	Persentase Pertumbuhan IKM	98.45	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	15,300,000
	Nilai Produksi IKM	9,701,546,064	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	14,350,000

Sumber Data: Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri, Bidang Kerjasama, Pengawasan, Evaluasi dan Promosi Investasi Industri, dan Bidang Sarana dan Prasarana Industri serta BPS

(https://drive.google.com/file/d/1MwYxNpEB_byRYLU9tnNlbKipK-WxU_c/view)



Silahkan memindai QR Code disamping untuk melihat Perjanjian Kinerja Eselon II sampai dengan Staf.

E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program,

kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel II.4. Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Bone meliputi :

Tujuan 1:

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM, dengan indikator:

- ✓ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Tujuan 2 :

Menurunkan Angka Kemiskinan, dengan indicator.

- ✓ Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
- ✓ Persentase pertumbuhan IKM
- ✓ Nilai Produksi IKM

Sasaran 1.1:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM, dengan indikator:

- ✓ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran 2.1:

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri, dengan Indikator.

- ✓ Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
- ✓ Persentase pertumbuhan IKM
- ✓ Nilai Produksi IKM

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan

membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel III.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	A	113%	Melampaui Target
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,87	6,87	100%	Mencapai Target
	Persentase Pertumbuhan IKM	98.45	102	103%	Melampaui Target
	Nilai Produksi IKM	9,701,546,064	13,963,048,000	143%	Melampaui Target
Rata-rata				114%	

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan BPS

Berdasarkan data di atas, rata2 capaian kinerja yaitu 114% dengan capaian Sasaran 1 yaitu 113% dan Sasaran 2 yaitu 100%, 103% dan 143% maka dapat disimpulkan capaian Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Melampaui Target yang telah ditentukan sehingga persentase capaian diberi Kategori **Sangat Berhasil**.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel III.2. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	BB	A	-	-	100	100	113	-	-
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,35	6,98	6,87	6,87	-	-	98,72	100	100	-	-
	Persentase Pertumbuhan IKM	92,76	94,76	97,85	102	-	-	100	101	103	-	-
	Nilai Produksi IKM	9,698,636,766	9,699,606,532	9,804,726,298	13,963,048,000	-	-	100	101	143	-	-

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan BPS

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dengan Sasaran 1 pada Tahun 2019 dengan nilai capaian yaitu 100%, Tahun 2020 dengan nilai capaian yaitu 100% dan Tahun 2021 capaiannya yaitu 113% sedangkan Tahun 2022 dan 2023 belum terlaksana, maka bisa diberi Kategori **Berhasil** . Sasaran 2 dengan Indikataor 1 padaTahun 2019 nilai capaiannya yaitu 98,72 % , Tahun 2020 dengan nilai capaian yaitu 100% dan tahun 2021 nilai capaiannya 100% , Indikator 2 capaian Tahun 2019 yaitu 100%, Tahun 2020 sebanyak 101% dan Tahun 2021 dengan Nilai 103%. Indikator 3 pada Tahun 2019 capaian 100%, Tahun 2020 capaian 101% dan Tahun 2021 capaiannya yaitu 143% dari capaian 3 Tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa capaiannya dapat diberi kategori **Sangat Berhasil**, dengan penjelasan sebagai berikut:

✚ Tujuan 1:

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM, dengan indikator:

- ✓ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

✚ Tujuan 2 :

Menurunkan Angka Kemiskinan, dengan indicator.

- ✓ Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
- ✓ Persentase pertumbuhan IKM
- ✓ Nilai Produksi IKM

❖ Sasaran 1.1:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM, dengan indikator:

- ✓ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

❖ Sasaran 2.1:

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri, dengan Indikator.

- ✓ Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
- ✓ Persentase pertumbuhan IKM
- ✓ Nilai Produksi IKM

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	cc	B	BB	A	-	-
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,35	6,98	6,87	6,87	-	-
	Persentase Pertumbuhan IKM	92,76	94,76	97,85	102	-	-
	Nilai Produksi IKM	9,698,636,766	9,699,606,532	9,804,726,298	13,963,048,000	-	-

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan BPS

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja pada Sasaran I Tahun 2019 yaitu B, Tahun 2020 BB dan Tahun 2021 yaitu A sedangkan Tahun 2022 dan 2023 belum terlaksana. Realisasi Kinerja pada Sasaran II dengan Indikator Kinerja 1 yaitu Tahun 2019 realisasinya 6,98 %, Tahun 2020 realisasinya 6,87% dan Tahun 2021 realisasinya 6,87%. Indikator Kinerja 2 pada Tahun 2019 yaitu 94,76%, Tahun 2020 yaitu 97,85% dan Tahun 2021 yaitu 102% sedangkan Indikator Kinerja 3 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019 yaitu Rp. 9,699,606,532,-. Tahun 2020 yaitu Rp. 9,804,726,298 dan Tahun 2021 yaitu Rp. 13,963,048,000.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	BB	BB
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,87	24,9	24,92
		Persentase Pertumbuhan IKM	102	99,7	99,7
		Nilai Produksi IKM	13,963,048,000	94,300,000,000	120,800,000,000

Sumber Data: Dinas Perindustrian, BPS dan Kemenperin.

Berdasarkan tabel III.4 di atas, dijelaskan bahwa target Standar Nasional pada Tahun 2021 yaitu Target Nilai Sakip BB realisasi BB sedangkan Nilai PDB standar Nasional yaitu 24,9% dengan Realisasi 24,92% serta Pertumbuhan IKM standar Nasional yaitu 99,7% dengan realisasi 99,7% dan tingkat Nilai Produksi sesuai standar nasional yaitu Rp.94,3 Miliar dengan realisasi Rp.120,8 Miliar.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel III.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d<110	60= \leq s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	113%	113%	√			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	100%	100%		√		
	Persentase Pertumbuhan IKM	103%	103%	√			
	Nilai Produksi IKM	143%	143%	√			

Berdasarkan data pada tabel III.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2021 dalam kategori **Berhasil dan Sangat Berhasil**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM

Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM

Tujuan 2 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri

Dari tabel III.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM dengan indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP menunjukkan predikat **Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100% yang didukung oleh sasaran dengan jumlah indikator kinerja 1 yang

menunjukkan predikat **Berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%. Pencapaian Tujuan Menurunnya Angka Kemiskinan dengan Indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan IKM, dan Nilai Produksi IKM menunjukkan predikat **Sangat Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100%, 103% dan 143% didukung 1 sasaran dengan jumlah indikator kinerja yaitu 3.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

• Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Definisi: Predikat Evaluasi SAKIP adalah Hasil Reviu oleh Tim APIP

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dalam kategori **Berhasil**, yaitu tercapai **113%** dengan realisasi sebesar **113%** dari target **100%** hal ini karena:

1. Melakukan perbaikan dokumen LKJIP/SAKIP berdasarkan Rekomendasi hasil review Inspektorat Kabupaten Bone Tahun 2021
2. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait penyusunan Laporan LkjIP/SAKIP
3. Melakukan Asistensi penyusunan Dokumen LkjIP/SAKIP baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi.

Pencapaian di atas telah **mencapai target**, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih adanya kebutuhan akan data, untuk diolah menjadi informasi, yang belum dapat terpenuhi.
2. Adanya pandemi juga mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami perubahan metode pelaksanaan kegiatan sehingga baru dapat dilaksanakan pada Triwulan akhir.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Melakukan evaluasi kegiatan, terutama kegiatan yang akan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya, untuk mempertimbangkan waktu persiapan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang;
2. Merencanakan setiap kegiatan dengan teliti dan seksama sehingga realisasi dari anggaran menjadi lebih terkendali dan dapat terdistribusi merata pada setiap Triwulannya

• Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan IKM, Nilai Produksi IKM

Definisi: Kontribusi sector Industri terhadap PDRB, Persentase Pertumbuhan IKM dan Nilai Produksi IKM.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Kontribusi sector Industri terhadap PDRB dalam kategori **berhasil**, yaitu tercapai **100%** dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%, capaian Persentase Pertumbuhan IKM dalam kategori **sangat berhasil** yaitu tercapai 103% dengan realisasi 102% dari target 98,45% sedangkan capaian indikator Nilai Produksi IKM yaitu tercapai 143% dengan realisasi Rp. 13.963.048.000,- dari target Rp. 9.701.546.064,- hal ini karena didukung oleh 3 Program yaitu :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Keterbatasan SDM tim Teknis Industri yang turun secara langsung ke lokasi dalam melakukan pendataan IKM (Industri Kecil Menengah).
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Industri dalam melakukan perbaikan kemasan.
3. Masih Kurangnya Pengetahuan SDM pelaku IKM terkait pengolahan industry dan juga terkait Legalitas Produk.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk meningkatkan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ,Persentase pertumbuhan IKM dan Nilai Produksi IKM antara lain:

1. Melakukan perbaikan Kemasan terhadap Pelaku IKM yang Kemasannya masih jauh dari standar, maka Kami melakukan Pelayanan di Klinik Kemasan.
2. Melakukan kerjasama terkait Promosi Produk seperti :
 - Promosi Produk di Bukalapak, dan sosial media lainnya.
 - Galeri Industri di Tanjung Pallette kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.
 - Galeri Industri di BTC kerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Bone
 - Halo Galeri Industri Bone terkait Penjualan Produk IKM Kab.Bone.
3. Melakukan kerjasama dengan PT.Pertamina dan Dekranasda Provinsi maupun Kabupaten dalam hal Bantuan Modal bagi Pelaku IKM. Tahun 2020 ada 2 Pelaku IKM yang mendapatkan bantuan yaitu IKM Kripik Tempe dan Ocean Food.
4. Melakukan kerjasama dengan Balai Diklat Industri terkait beberapa pelatihan atau diklat yang dilakukan di Kabupaten Bone seperti :
 - Diklat 3 in 1 Desain Kemasan
 - Diklat 3 in 1 Aneka Pengolahan Ikan
 - Diklat 3 in 1 Barista
 - Diklat 3 in 1 Aneka Olahan Coklat
 - Diklat 3 in 1 Pengolahan Rumput Laut
5. Memberikan Bantuan Mesin dan Peralatan berupa Mesin Pencacah Sukun bagi pelaku IKM yang memasukkan usulannya di Musrenbang RKPD Tahun 2021, serta Bantuan Mesin Peralatan Sumur Bor dan Hibah Uang bagi Pelaku IKM. Bantuan Mesin Peralatan Kopi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi SulSel dan juga Memberikan Bantuan Mesin Jahit bagi Pelaku IKM yang ada di Kabupaten Bone dan juga Bantuan Mesin Press.
6. Melakukan Pengembangan SDM bagi Pelaku IKM berupa Pelatihan Pengolahan Gula Merah, Pelatihan Kerajinan Bambu, Lampu Hias dari Bila

serta Pelatihan Kerajinan Batik. Pelatihan Kerajinan Tas Sutera yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Prov SulSel kerjasama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone serta Dekranasda Prov/Kab.

7. Melakukan Fasilitasi Standarisasi SNI dan Fasilitasi NIB, PIRT, Halal, Haki, BPOM dll yang terkait Industri.
8. Melakukan Fasilitasi Produk Industri atau IKM yang dipasarkan ke Pasar Modern yaitu Hotel Novotel Makassar dan Gelael Makassar.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel III.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	A	113%	3,884,413,099	3,942,641,841	101	1%
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,87	6,87	100%	1,006,744,000	983,253,416	97.67	2,33%
	Persentase Pertumbuhan IKM	98.45	102	103%	20,844,000	18,080,000	86.74	16,26%
	Nilai Produksi IKM	9,701,546,064	13,963,048,000	143%	19,844,000	18,660,000	94.03	48,97%

Sumber Data: Dinas Perindustrian Kab.Bone

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa

pada pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 113 % dan capaian anggaran 101%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 1 % dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 1%.
2. Indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 97,67% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,33%.
3. Indikator Persentase Pertumbuhan IKM dengan capaian kinerja 103% dan capaian anggaran 86,74% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16,26%.
4. Indikator Nilai Produksi IKM dengan capaian kinerja 143% dan capaian anggaran 94,03% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 48,97%.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone sebagai berikut:

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

Tabel III.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	113%	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang memiliki ijin di Kab/Kota	100	100	100	Diisi Upaya Perbaikannya
			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang memiliki ijin di Kab.Bone	100	100	100	
			Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rekomendasi Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota wilayah Kabupaten Bone	1	1	100	

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan LPG. Jumlah Laporan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung BBM dan LPG yang diterbitkan Dinas Terkait	2	2	100	
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Produksi Pertambangan yang Berizin. Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Pertambangan	2	2	100	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Perangkat Daerah Teknis	100	100	100	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	7	7	100	

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	2	2	100	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang dievaluasi	2	2	100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan	12	12	100	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya(Pasang)	60	60	100	
			Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Aparat yang diikuti	1	1	100	

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Pelaksanaan Bimtek	5	5	100	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	12	12	100	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik/Makanan Minuman yang disediakan	12	12	100	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	12	100	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pembayaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	65	65	100	

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sesuai rencana kebutuhan	4	4	100	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor sesuai rencana kebutuhan	4	4	100	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai rencana kebutuhan	4	4	100	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Wifi/Internet, Air dan TV Kabel dibayarkan	108	108	100	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan realisasi pembayaran Jasa Upah kerja bagi tenaga Administrasi/Operator dan upah jasa lainnya, Asuransi Tenaga Kerja dan Honorarium	12	12	100	

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12	12	100	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	12	12	100	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	3	3	100	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	100%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	80	80	100	
	Persentase Pertumbuhan IKM	103%	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	100	100	100	

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

	Nilai Produksi IKM	143%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah SDM Perempuan dan Laki-laki IKM yang Mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan, Kerajinan dan Pembangunan Sumber Daya Industri yang dikembangkan	120	124	103	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Mesin/Peralatan IKM yang diadakan	5	5	100	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Promosi Produk dan Pameran Potensi Industri Lokal dan ESDM yang diikuti dengan melibatkan Pelaku IKM	6	6	100	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota				
			Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	Cakupan Peningkatan struktur industri	100	100	100	

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan, Jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	27	27	100	
				Jumlah IKM yang diperbaiki Kemasannya serta dibina dan dikembangkan. Jumlah Produk IKM yang Terstandarisasi dan Produk Industri Bestandar SNI yang diawasi	28	28	100	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	100	100	100	
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone 2021

		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota Melalui SIINAS	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	1	1	100	

Sumber Data: Bagian Program dan Keuangan

Berdasarkan tabel III.7 diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

✚ Tujuan 1:

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM, dengan indikator:

- ✓ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

❖ Sasaran 1.1:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM, dengan indikator:

- ✓ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

dengan target 100% telah **Sangat Berhasil** tercapai sebesar 113% atau tercapai 113%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapai kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Melakukan evaluasi kegiatan, terutama kegiatan yang akan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya, untuk mempertimbangkan waktu persiapan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang;
2. Merencanakan setiap kegiatan dengan teliti dan seksama sehingga realisasi dari anggaran menjadi lebih terkendali dan dapat terdistribusi merata pada setiap Triwulannya;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan;
4. Meningkatkan kemampuan staf yang menangani administrasi pelaksanaan kegiatan;
5. Meningkatkan kompetensi SDM Perindustrian dalam hal pengelolaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan basis data serta kemampuan analisis;
6. Mengevaluasi kembali penetapan target Indikator Kinerja Utama yang memiliki capaian sangat tinggi.

+ Tujuan 2 :

Menurunya Angka Kemiskinan, dengan indicator.

- ✓ Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
- ✓ Persentase pertumbuhan IKM
- ✓ Nilai Produksi IKM

❖ Sasaran 2.1:

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri, dengan Indikator.

- ✓ Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
- ✓ Persentase pertumbuhan IKM
- ✓ Nilai Produksi IKM

dengan target Indikator 1 yaitu **6,87%** telah **Berhasil** tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Target Indikator 2 yaitu 98,45% telah **Sangat Berhasil** tercapai sebesar 103% sedangkan target Indikator 3 telah **Sangat Berhasil** dengan capaian sebesar 143% ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapai kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Melakukan perbaikan Kemasan terhadap Pelaku IKM yang Kemasannya masih jauh dari standar, maka Kami melakukan Pelayanan di Klinik Kemasan.
2. Melakukan kerjasama terkait Promosi Produk seperti :
 - Promosi Produk di Bukalapak dan sosial media lainnya.
 - Galeri Industri di Tanjung Palette kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.
 - Galeri Industri di BTC kerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Bone
 - Halo Galeri Industri Bone terkait Penjualan Produk IKM Kab.Bone.
3. Melakukan kerjasama dengan PT.Pertamina dan Dekranasda Provinsi maupun Kabupaten dalam hal Bantuan Modal bagi Pelaku IKM. Tahun 2020 ada 2 Pelaku IKM yang mendapatkan bantuan yaitu IKM Kripik Tempe dan Ocean Food.
4. Melakukan kerjasama dengan Balai Diklat Industri terkait beberapa pelatihan atau diklat yang dilakukan di Kabupaten Bone seperti :
 - Diklat 3 in 1 Desain Kemasan
 - Diklat 3 in 1 Aneka Pengolahan Ikan
 - Diklat 3 in 1 Barista

- Diklat 3 in 1 Aneka Olahan Coklat
- Diklat 3 in 1 Pengolahan Rumput Laut
- 5. Memberikan Bantuan Mesin dan Peralatan berupa Mesin Pencacah Sukun bagi pelaku IKM yang memasukkan usulannya di Musrenbang RKPD Tahun 2021, serta Bantuan Mesin Peralatan Sumur Bor dan Hibah Uang bagi Pelaku IKM. Bantuan Mesin Peralatan Kopi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi SulSel dan juga Memberikan Bantuan Mesin Jahit bagi Pelaku IKM yang ada di Kabupaten Bone.
- 6. Melakukan Pengembangan SDM bagi Pelaku IKM berupa Pelatihan Pengolahan Gula Merah, Pelatihan Kerajinan Bambu, Lampu Hias dari Bila serta Pelatihan Kerajinan Batik. Pelatihan Kerajinan Tas Sutera yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Prov SulSel kerjasama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone serta Dekranasda Prov/Kab.
- 7. Melakukan Fasilitasi Standarisasi SNI dan Fasilitasi NIB, PIRT, Halal, Haki, BPOM dll yang terkait Industri.
- 8. Melakukan Fasilitasi Produk Industri atau IKM yang dipasarkan ke Pasar Modern yaitu Hotel Novotel Makassar dan Gelael Makassar.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar **Rp. 4.931.845.099 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)** sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III.8 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	3,884,413,099	3,942,641,841	101.50
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Industri dan ESDM	3,884,413,099	3,942,641,841	101.50
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	62,884,000	53,939,400	85,78
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3,821,529,099	3,888,702,441	101,76
Tujuan 2 : Menurunnya Angka Kemiskinan	1,047,432,000	1,019,993,416	97.38
Sasaran 2.1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri	1,047,432,000	1,019,993,416	97.38
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,006,744,000	983,253,416	97,67
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	20,844,000	18,080,000	86,74
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	19,844,000	18,660,000	94,03
Total	4,931,845,099	4,962,635,257	100.62

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone serta Visi, Misi dan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Program Penataan Struktur Industri yang telah dijabarkan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

Keseluruhannya dilaksanakan melalui pokok-pokok kegiatan, antara lain:

1. Mengumpulkan, Mengolah dan Mengelola Data Perusahaan Industri
2. Mengumpulkan, Mengolah dan Mengelola Data Perkembangan Teknologi Industri
3. Membangun dan Mengembangkan Aplikasi Halo GIBO.
4. Membangun, Mengembangkan, Memelihara dan Menyediakan Sistem Jaringan
5. Menganalisis dan Menyajikan Informasi Perkembangan Industri
6. Menganalisis dan Menyajikan Informasi Perkembangan Investasi Industri
7. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Data Dan Informasi Industri 4.0
8. Mengembangkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
9. Menginput Data IKM ke Aplikasi Siinas
10. Mengolah, Melatih SDM pelaku IKM
11. Mempromosikan atau Memberdayakan Produk IKM
12. Memperbaiki Kualitas Kemasan Produk IKM
13. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
14. Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran
15. Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi
16. Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan
17. Pengelolaan Kepegawaian - Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan
18. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
19. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Kantor

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

- **Kendala**

Kendala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone tidak semata-mata hanya melayani kebutuhan data dan informasi dalam menunjang rencana-rencana strategis yang telah

disusun, namun juga melayani kebutuhan data dan informasi dari Dinas terkait, serta memfasilitasi kebutuhan pimpinan terutama di bidang sarana teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Realisasi anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Bone tahun 2021 sebesar 100,62% menunjukkan peningkatan realisasi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, berdasarkan capaian akhir kegiatan maupun capaian akhir sasaran kegiatan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Data dan Informasi pada tahun anggaran 2021 dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari terealisasinya program dan hasil-hasil yang ingin dicapai. Dari 2 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja Utama yang ada pada Renstra. Adapun 4 IKU tercapai sesuai target dan 3 IKU tercapai di atas target. Semua ini dapat diraih berkat terbinanya hubungan kerja yang kondusif diantara semua pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Bone baik di tingkat pejabat, staf pelaksana maupun antara keduanya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada tahun 2021 antara lain meliputi:

1. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya kebijakan penghematan dan realokasi anggaran yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2021;
2. Adanya pandemi juga mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami perubahan metode pelaksanaan kegiatan sehingga baru dapat dilaksanakan pada Triwulan akhir;
3. Masih adanya kebutuhan akan data, untuk diolah menjadi informasi, yang belum dapat terpenuhi;
4. Keterlambatan pihak penyedia dalam mengajukan tagihan menyebabkan adanya tagihan yang tidak terbayar pada akhir tahun;
5. Kurangnya pemahaman terkait proses revisi dan pencairan anggaran menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembayaran.

- **Langkah Tindak Lanjut**

Beberapa langkah dan tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan dalam perencanaan program dan kegiatan selanjutnya adalah:

1. Melakukan evaluasi kegiatan, terutama kegiatan yang akan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya, untuk mempertimbangkan waktu persiapan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang;

2. Merencanakan setiap kegiatan dengan teliti dan seksama sehingga realisasi dari anggaran menjadi lebih terkendali dan dapat terdistribusi merata pada setiap Triwulannya;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan;
4. Meningkatkan kemampuan staf yang menangani administrasi pelaksanaan kegiatan;
5. Meningkatkan kompetensi SDM Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam hal pengelolaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan basis data serta kemampuan analisis;
6. Mengevaluasi kembali penetapan target Indikator Kinerja Utama yang memiliki capaian sangat tinggi.

Lampiran :

1).

Matriks Renstra



2).

Cascading Kinerja



3).

Perjanjian Kinerja



4).

Ringkasan
Pengukuran Kinerja



5).

PENGHARGAAN



6).

INOVASI



7).

DOKUMENTASI PELAYANAN

MoU Pemda Bone dengan Satker Kementerian Perindustrian (BBIHP, BDI, ATIM, AKOM, SMAK, SMK Industri)



PELAYANAN JASA KONSULTASI DAN DESAIN PRODUK DI KLINIK KEMASAN

